

Abstract

This article is based on the authors' concerns regarding the problem of violations and misuse of personal data that has often occurred in the Fintech industry, especially in Fintech Peer to Peer Lending. This article uses a normative legal research method. Based on the results of study, it can be seen that the legal protection of personal data in Indonesia, especially in the Fintech industry is good enough, but it cannot be said to be the maximum because the existing regulations are incomplete and comprehensive. The offenders are generally only subject to administrative sanctions, but some are in the form of civil sanctions and criminal sanctions if there are criminal elements that can be related to Electronic Information and Transactions Law. Until now the government is still working to improve supervision and prevent the misuse of personal data, including personal data in the Fintech industry. This is known by the presence of the draft bill of personal data protection.

Keywords:

consumer; fintech; industry; legal protection; personal data.

Abstrak

Artikel ini dibuat atas dasar keprihatinan penulis pada masalah pelanggaran dan penyalahgunaan data pribadi yang sering terjadi dalam industri *Fintech*, terutama pada *Fintech Peer to Peer Lending*. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam industri *Fintech* sudah cukup baik, namun belum bisa dikatakan maksimal sebab peraturan-peraturan yang ada belum lengkap dan menyeluruh. Para pelanggarnya umumnya hanya dikenakan sanksi administratif, namun ada juga yang berupa sanksi perdata serta sanksi pidana bila terdapat unsur pidana yang dapat dikaitkan dengan UU ITE. Sampai saat ini pemerintah masih terus berupaya untuk meningkatkan pengawasan sekaligus pencegahan penyalahgunaan data pribadi, termasuk data pribadi dalam industri *Fintech*. Hal ini diketahui dengan adanya kehadiran RUU Perlindungan Data Pribadi.

Kata kunci:

data pribadi; *fintech*; industri; konsumen; perlindungan hukum.